

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG KOTABUMI

Oleh:

MUHAMMAD THARIQ FADHILA

Kredit merupakan sumber modal bagi pelaku ekonomi, dan penyaluran kredit dilakukan melalui perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPdata. Mengacu pada pasal 1754 KUHPdt bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam ada kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan barang atau jumlah yang sama, BRI berperan sebagai salah satu bank yang menyalurkan KUR dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Dengan rendahnya tingkat suku bunga KUR yaitu 6% pertahun, Debitur banyak mengajukan kredit ini, namun disinyalir para debitur tidak melakukan kewajibannya (gagal bayar).

Jenis penelitian ini adalah studi hukum normatif empiris dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah *non-judicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian Kredit Usaha Rakyat di BRI Cabang Kotabumi, Surat Pengakuan Hutang memegang peranan penting sebagai dokumen yang mengatur hubungan antara debitur dan kreditur. Pelaksanaan hak dan kewajiban nasabah KUR BRI Cabang Kotabumi tidak seluruhnya dapat terimplementasikan dengan baik dikarenakan terdapat sejumlah hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah ketidakstabilan finansial yang dialami oleh nasabah, akibat fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan kenaikan biaya produksi. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan dan kesulitan dalam mengelola arus kas, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman dengan tepat waktu atau bahkan menyebabkan wanprestasi.

Kata kunci: BRI Kotabumi, Hak dan kewajiban, Kredit Usaha Rakyat.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) PROVIDING AT BANK PEOPLE INDONESIA (BRI) KOTABUMI BRANCH

By:

MUHAMMAD THARIQ FADHILA

Credit is a source of capital for economic actors, and credit distribution is carried out through loan and borrowing agreements regulated in Article 1754 of the Civil Code. Referring to article 1754 of the Criminal Code that in a loan agreement there is an obligation for the borrower to return goods or the same amount, BRI acts as one of the banks that distributes KUR at relatively low interest rates. With the low KUR interest rate, namely 6% per year, many debtors apply for this credit, but it is suspected that the debtors are not carrying out their obligations (failing to pay).

This type of research is an empirical normative legal study with the type of research used is descriptive legal research. The problem approach used is non-judicial case study. The data used in this research are primary data and secondary data and tertiary legal materials. Data collection was carried out by interviews and literature study. The data collected was then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion describe that in implementing the rights and obligations of the People's Business Credit agreement at BRI Kotabumi Branch, the Debt Acknowledgment Letter plays an important role as a document that regulates the relationship between debtors and creditors. The implementation of the rights and obligations of KUR BRI Kotabumi Branch customers cannot be fully implemented properly due to a number of obstacles. The obstacles faced are financial instability experienced by customers, due to market fluctuations, changes in regulations, and increases in production costs. This leads to reduced income and difficulty in managing cash flow, which in turn hinders their ability to repay loans on time or even leads to default.

Keywords: *BRI Kotabumi, Rights and Obligations, People's Business Credit.*